

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN  
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PENGANTAR JENAZAH  
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam  
pada Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**MOH. FAUZI FADLAN**  
**NIM: 10300111038**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Fauzi Fadlan  
NIM : 10300111038  
Tempat/tgl. Lahir : polewali , 13 Mei 1993  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Sultan Alauddin, Lr. Salemba No. 10  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengantar Jenazah (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Makassar, 16 November 2015  
Penyusun

**Moh. Fauzi Fadlan**  
**NIM: 10300111038**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Pengantar Jenazah (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”, yang disusun oleh Moh. Fauzy Fadlan, NIM : 10300111038, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Jumat 18 Desember 2015, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Desember 2015 M  
6 Rabiul Awal 1437 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag (.....)  
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M. Si (.....)  
Munaqisy I : Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag (.....)  
Munaqisy II : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag (.....)  
Pembimbing I : Drs. H. M. Gazali Syuti, M. HI (.....)  
Pembimbing II: Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi (.....)

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag  
NIP. 19621016 199003 1003

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Pengantar Jenazah (Studi Kasus Polrestabes Makassar)**, sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar.

Kepada Ayahanda tercinta **H. Husnul, SE., M.M** dan Ibunda tercinta **Hj. HAMSIAH, S.Farm., M.Kes.** Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk cintanya, dukungannya, kesabarannya, perhatiannya, bimbingannya dan doanya yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk kakak tercinta **Nurul Hidayah, SKM., M.Kes** dan **Nurilmi Ramadhan, S.Farm. Apt.** atas pengertian dan dukungannya.

Selanjutnya, orang-orang yang juga memiliki jasa besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor UIN Alauddin Makassar dan Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh pembantu dekan yang telah memberikan bantuan fasilitas serta pembimbingan selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

2. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M. Si selaku Ketua Jurusan yang telah memberikan bimbingan, saran, nasehat, dan petunjuk, sehingga penyusunan skripsi ini dapat saya selesaikan. Serta, staf jurusan kak Syamsi Mahmoed, dkk yang telah banyak memberikan bantuannya.
3. Bapak Drs. HM. Gazali Suyuti, M.Hi selaku pembimbing 1 dan Dr. Kurniati., M.Ag selaku pembimbing II yang dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muh. Saleh Ridwan selaku munaqisy I dan M. Ag Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag selaku munaqisy II yang telah memberikan bimbingan, saran, nasehat, dan petunjuk, sehingga penyusunan skripsi ini dapat saya selesaikan.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen fakultas Syariah dan Hukum yang pernah mengajar dan membimbing. Permohonan maaf apa bila ada kekhilafan yang penyusun lakukan selama Bapak/Ibu menjelaskan mata Kuliah baik berupa ucapan, serta tingkah laku yang tidak sepatutnya pernah penyusun lakukan.
6. Ibu kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi berupa alquran dan terjemahnya, buku, skripsi dan majalah yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak AKBP H. Jamaluddin selaku Kasat BINMAS dan Bapak Oktavianus M selaku Wakasat BINMAS di Kantor Polrestabes Makassar

yang telah memberikan kemudahan saat penyusun melakukan penelitian di instansi tersebut.

8. Seluruh informan pada penelitian ini yang telah bersedia diwawancarai dan meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya.
9. Dian Ardyanti., SKM selaku teman spesial yang selalu setia, mendukung dan sabar mendampingi, serta meluangkan waktunya untuk penulis.
10. Teman-teman PLEDOI angkatan 2011 atas kebersamaannya selama berada di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan Janganlah kita saling melupakan meskipun kita saling terpisah.
11. Teman-teman FIVEN yang selama ini telah banyak memberikan masukan dan semangat kepada penulis.
12. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak membantu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif. Semoga skripsi ini dapat memberi suatu manfaat kepada semua pihak yang sempat membaca serta membutuhkannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 16 November 2015  
Penulis,

Moh. Fauzi fadlan  
Nim: 10300111038

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1-10
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN TEORITIS .....	12-48
A. Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Pengantar Jenazah.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Pengertian Pelanggaran .....	12
3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	14
4. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas .....	19
5. Pengertian Pengantar Jenazah .....	23

B. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas .....	23
C. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kejahatan.....	34
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	37
E. Tinjauan Menurut Pandangan Islam .....	40
F. Kerangka Konseptual .....	48
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>49-53</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	49
C. Sumber Data .....	49
D. Metode Pengumpulan Data .....	50
E. Instrumen Penelitian.....	51
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	51
G. Pengujian dan Keabsahan Data .....	53
<b>BAB IV. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DILAKUKAN OLEH PENGANTAR JENAZAH .....</b>	<b>54-65</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
B. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Pengantar Jenazah.....	63
C. Upaya Penegak Hukum dalam Menanggulangi terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Pengantar Jenazah	65



BAB V. PENUTUP.....	71-73
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## ABSTRAK

**Nama : Moh. Fauzi Fadlan**

**Nim : 10300111038**

**Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengantar Jenazah (Studi Kasus Polrestabes Makassar)**

Skripsi ini merupakan studi tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengantar jenazah. Pengantar Jenazah adalah beberapa orang yang secara bersama-sama atau beriringan, bergerombol, berkelompok atau secara massal mengantarkan jenazah ke liang lahat. Setiap mengantar jenazah para pengendara motor pengantar jenazah tersebut melakukan pelanggaran yakni tidak memakai helm, bonceng tiga, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan seringkali membawa kayu atau bambu yang digunakan untuk menyuruh para pengendara lain motor atau mobil minggir. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil rumusan masalah yang meliputi 2 hal, bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah dan bagaimana upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh pengantar jenazah.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan dilakukan penelitian di kota Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya di kantor kepolisian Polrestabes Makassar dengan mewawancarai pihak-pihak kepolisian yang benar-benar mengetahui pokok masalah yang sedang diteliti. Yaitu Kabinmas dan Wakabinmas, beberapa satuan BINMAS dan juga kepala Reserse dan Kriminal dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah serta upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh pengantar jenazah.

Dari hasil penelitian, penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah terkait penerapan terkhusus tentang pengantar jenazah yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak pakai helm, berbocengan tiga dan menerobos lampu merah. Itu semua dimaklumi karena para pengantar jenazah lagi dalam keadaan berduka selama tidak melampaui batas seperti mengganggu pengendara lain dan bertindak anarkis di jalanan seolah-olah milik sendiri, lebih-lebih merusak kendaraan orang lain itu akan ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang Lalu Lintas yang berlaku. Upaya penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah dapat ditempuh melalui upaya preventif yang terbagi menjadi upaya preventif umum dan khusus serta melalui upaya represif.

Untuk menekan tingginya pelanggaran lalu lintas terhadap pengantar jenazah maka upaya penanggulangan yang harus dilakukan adalah dari pihak kepolisian agar dapat mengawal para pengantar jenazah yang ada di jalan-jalan agar mereka bisa tetap tertib berlalu lintas sehingga keselamatan mereka dapat terjaga setiap saat. Dalam hal ini pihak kepolisian harus mengawal tanpa diskriminatif. Serta memberi pemahaman berlalu lintas harus lebih ditingkatkan misalnya melalui penyuluhan ke Masyarakat, Sekolah-sekolah, Perguruan tinggi, Koran, maupun TV tentang berlalu lintas agar para pengantar jenazah maupun masyarakat lainnya dapat pengetahuan yang lebih mengenai lalu lintas sehingga pelanggaran dapat berkurang dan dapat dihindari.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi kota- kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka- angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat member pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini Nampak juga membawa pengaruh keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor, tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk pejalan kaki yang kurang hati- hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu- rambu lalu lintas.<sup>1</sup>

Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan

---

<sup>1</sup>Warpani Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* ( Bandung: PT. ITB, 2005), h. 105.

yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, contohnya kemacetan dan kecelakaan. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah. Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya.<sup>2</sup>

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut di atas, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, merupakan faktor penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas<sup>3</sup>

Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan,

---

<sup>2</sup>Warpani Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, h.135.

<sup>3</sup>Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas Jalan* ( Jakarta: Rajawali, 1983 ) h. 23.

ketertiban, dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa tahun yang lalu pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.<sup>4</sup>

Transportasi darat di Kota Makassar yang kelihatannya makin hari semakin berkembang merupakan suatu masalah yang sangat esensial untuk dipecahkan karena hal tersebut merupakan kebutuhan primer masyarakat. realitas menunjukkan bahwa jalan raya di Kota Makassar sekarang ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan, baik roda dua, roda empat, becak dan lebih terkhusus lagi angkutan umum (pete-pete dan taksi). Sehingga sering menimbulkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Keadaan tersebut semakin bertambah parah karena banyak pengguna jalan raya kurang memahami peraturan lalu lintas jalan raya. Sebagaimana dapat disaksikan disepanjang jalan pettarani, daya, dan tempat-tempat lainnya masih banyak tukang becak yang mengayuh becaknya di jalan-jalan terlarang, sopir-sopir angkutan umum sering berhenti di sembarang tempat dan tidak menyalakan

---

<sup>4</sup>Warpani Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, h.114

wesernya pada saat ingin singgah atau berhenti, serta banyak pejalan kaki yang menyebrang dengan seenaknya bukan di *zebra cross*.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya di Kota Makassar yang saat ini semakin hari semakin meresahkan yaitu para pengendara motor yang secara masif (bersama) mengantar jenazah.

Setiap mengantar jenazah para pengendara motor pengantar jenazah tersebut melakukan pelanggaran diantaranya tidak memakai helm, bonceng tiga, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sering kali membawa kayu atau bambu yang mereka gunakan untuk menyuruh para pengendara lain motor atau mobil minggir. Saat ini sangat jarang kita temui pengendara motor pengantar jenazah yang tertib lalu lintas. Pelanggaran tersebut tidak jarang mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan motor maupun mobil di jalan raya yang terjadi karena hal-hal teknis, misalnya para pengendara motor yang secara sengaja memukul mobil atau motor yang tidak mau minggir pada saat para pengendara motor pengantar jenazah menyuruhnya minggir, para pengendara motor dan mobil merasa keberatan jalannya diambil secara paksa dan sangat tidak disiplin, serta kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh para pengendara motor pengantar jenazah yang mengakibatkan mereka melakukan perbuatan yang semena-mena di jalan raya. Dengan melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat, maka sangatlah tidak patut untuk dicontoh perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain dan kepentingan umum maupun

## As-Saffat ayat ke 2



Ayat di atas menyatakan: Demi sekelompok makhluk ciptaan-Ku yang *bershaf-shaf* berbaris-berbaris teratur dengan *shaf* yakni barisan yang rapi, lalu demi para pencegah pelanggaran batas-batas ilahi dengan pencegahan sebenar-benarnya, lalu demi pembaca-pembaca dzikir yang agung.<sup>6</sup>

Dan di dalam Al-Quran Surah Al- A'raf ayat ke 56



<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al\_Mishbah* (Tangerang: Lentera Hati 2003), Cetakan I, h. 5.

*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*<sup>7</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan bumi dengan sebaik-baiknya dan sebaiknya kita ummatnya menjaga dengan baik dan tidak merusak karna kepentingan individu maupun kelompok. Jadi para pengantar jenazah agar dengan tertib di saat iring-iringan di jalan tanpa berbuat anarkis yang bisa merugikan pengguna jalan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilakukan secara “damai” yang sebenarnya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seharusnya polisi lalu lintas tidak melakukan hal tersebut, karena perbuatan atau tindakan demikian bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Pengantar Jenazah (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada penelitian ini berfokus pada tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah (studi kasus Polrestabes Makassar), serta untuk mengembangkan sejauh mana penerapan

---

<sup>7</sup>Kemantrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 212.



hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah secara massif.

## 2. Deskripsi Fokus

### a. Tinjauan Yuridis :

- 1) Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)<sup>8</sup>.
- 2) Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum; bantuan-bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan)<sup>9</sup>.
- 3) Tinjauan yuridis adalah Metode penelitian sejarah, yang ingin menyelidiki hal-hal berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal pada masa lampau<sup>10</sup>.

- b. Tindak Pidana : perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 120.

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1174.

<sup>10</sup>Ande Prastowo, *Mahami Metode- Metode Penelitian; Suatu Tujuan Teoritis* (Jogyakarta : Media Joyakarta, 2011), h. 98.

<sup>11</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditma, 2011), h. 26.

c. Pelanggaran lalu lintas adalah :

- 1) Pelanggaran adalah merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. *Crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum”.<sup>12</sup>
- 2) Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya).<sup>13</sup>
- 3) Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>14</sup>

d. Pengantar Jenazah adalah

- 1) Pengantar adalah beberapa orang yang secara bersama-sama atau beriringan, bergerombol, berkelompok menuju suatu tujuan.<sup>15</sup>
- 2) Jenazah adalah orang yang telah meninggal dunia.<sup>16</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak

---

<sup>12</sup>Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Displin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas Jalan*, h. 7.

<sup>13</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia* ( Jakarta : PT. Balai Pustaka, 1983 ), h. 555.

<sup>14</sup>Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Displin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas Jalan*, h. 19.

<sup>15</sup>Departemen Penddidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 985.

<sup>16</sup>Departemen Penddidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 507.

pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah ?  
Berdasarkan pokok masalah tersebut dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah ?
2. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh pengantar jenazah ?

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Warpani Suwadjoko dalam bukunya *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Pembahasannya begitu luas, dengan memadukan topik tradisional (rekayasa jalan, pengelolaan lalu lintas) dan topik non tradisional (tata guna lahan, transportasi umum). Akan tetapi, dalam buku tersebut tidak membahas tentang pelanggaran lalu lintas secara rinci.
2. Ramdlon Naming dalam bukunya *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas Jalan*. Buku ini membahas tentang kedisiplinan dalam berlalu lintas di jalan raya, kesadaran masyarakat akan lalu lintas jalan serta penanggulangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga disiplin dalam berlalu lintas. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana penegak hukum menyikapi kurangnya

kesadaran masyarakat tentang pelanggaran lalu lintas. Namun dalam buku ini tidak menjelaskan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas secara rinci.

3. Erdianto Efendi dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia*. Dalam buku ini membahas tentang pengertian tindak pidana, jenis tindak pidana, subjek dan objek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana serta sanksi terhadap tindak pidana. Namun dalam buku ini tidak membahas tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh pengantar jenazah;
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh pengantar jenazah.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **a. Kegunaan Teoritis**

Karya tulis ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum dibidang penerapan hukum atau implementasi hukum, di mana perihal yang mengatur tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah.

b. Kegunaan Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan para praktisi hukum yang berkompeten menangani kasus pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah.



## BAB II TINJAUAN TEORETIS

### **A. Tinjauan Umum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengantar jenazah**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*StafbaarFeit*”.<sup>1</sup> Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>2</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka yang telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>1</sup>Adami Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelse Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

<sup>2</sup>Maeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1.

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh aspek dari pengertian hukum pidana. Karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuatkan dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihatnya dari satu atau beberapa sisi saja, dan oleh karenanya selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk, dan berada diluarnya.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut dengan hukum pidana materil yang dapat juga disebut hukum pidana abstrak, dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana pada aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkrit atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering di sebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP, yakni UU No. 8 Tahun 1981).<sup>3</sup>

Hukum menurut materilnya dapat dibedakan dalam :

1. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kepentingan umum.

---

<sup>3</sup>Riduan Syahrani, *Ringkasan Intisari Ilmu Hukum*(Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 2004), h.75.

2. Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kepentingan pribadi.<sup>4</sup>

Bidang hukum yang termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara, hukum perburuan, hukum pajak, hukum internasional, dan hukum pidana. Sedangkan bidang hukum yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang, hukum perselisihan nasional (hukum antar tata hukum), dan hukum perdata internasional.<sup>5</sup>

Utrecht menganggap “hukum pidana” mempunyai kedudukan istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri diluar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagaimana suatu hukum sanksi (*Bijzonder Sanctie Recht*). Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini perlu, kata Utrecht, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Pelanggaran

Untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu sendiri dan

---

<sup>4</sup>Riduan Syahrani, *Ringkasan Intisari Ilmu Hukum*, h. 87.

<sup>5</sup>Riduan Syahrani, *Ringkasan Intisari Ilmu Hukum*, h. 53.

<sup>6</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*( Jakarta:PT. RajaGrafindo, 2010), h. 9.



pengertian pelanggaran yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran, yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif. Artinya bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan yang bersifat kuantitatif (*recht delicten*), artinya suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan.

Menurut JM Van Bemmelen yang dikutip Bambang Poernomo menyatakan bahwa :

“Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari pada pelanggaran dan dengan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan”. “Pelanggaran adalah (*politis-on recht*) dan kejahatan adalah (*crimineel-on recht*). *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan

oleh penguasa Negara. *Crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum”.<sup>7</sup>

Apabila hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek sehari-hari dimana pemberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran ternyata memang pada umumnya lebih ringan daripada sanksi pelaku kejahatan. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pendapatnya mengenai pelanggaran yang menyatakan bahwa : “*Overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lebih daripada perbuatan melanggar hukum”.

Dari beberapa pengertian pelanggaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.<sup>8</sup>

### 3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi Nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Lalu Lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri

---

<sup>7</sup>Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung:Bina Cipta,1987), h. 2-3.

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), h. 47.

perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan.

Ramdlon Naning mengemukakan bahwa pengertian lalu lintas jalan adalah sarana komunikasi dan transportasi yang terdiri dari jalan (terbuka untuk umum), dan kendaraan (bermotor dan tidak bermotor) yang digunakan oleh manusia sebagai kegiatan hilir mudik (pergi pulang) untuk mencapai tujuan.<sup>9</sup>

W.J.S. Poerwadarminta mengemukakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya).<sup>10</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanan. Baik itu gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas.

---

<sup>9</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Displin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas Jalan* ( Jakarta: Rajawali, 1983 ), h. 19.

<sup>10</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Berlalu Lintas*,(Jakarta: C.V. Rajawali, 1983), h. 89.

Ramdlon Naning menegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>11</sup>

Pelanggaran yang dimaksud diatas tersebut adalah sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 adalah :

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pengemudi menurut pasal 106 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 adalah :<sup>12</sup>

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

---

<sup>11</sup>Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Displin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas Jalan*, h. 19.

<sup>12</sup>Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
  - a. Rambu perintah atau rambu larangan.
  - b. Marka jalan.
  - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
  - d. Gerakan lalu lintas.
  - e. Berhenti dan parker.
  - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
  - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
5. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
  - a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor ;
  - b. Surat izin mengemudi;
  - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
  - d. Tanda bukti lain yang sah;

6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
7. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
8. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
9. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Selain diatur dalam perundang-undangan lalu lintas, ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas juga diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yakni pada pasal 511 KUHP yang berbunyi “barang siapa diwaktu ada pesta arak-arakan, dan sebagainya tidak menaati perintah atau petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas dijalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

Jadi, dalam hal ini pengemudi kemungkinan dan akibat dari perbuatannya dalam berlalu lintas adalah merupakan perbuatan pidana. Dengan demikian pengertian pelanggaran lalu lintas lebih sempit dibandingkan dengan pengertian

pelanggaran pada umumnya, hal ini disebabkan karena ruang lingkupnya lebih khusus hanya mengenai lalu lintas.

Sedangkan mengenai ancaman pidana bagi pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang lalu lintas adalah denda atau pidana kurungan. Jadi, di sini dapat disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) golongan pelanggaran lalu lintas, yaitu :

1. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan kesengajaan.
2. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan tidak adanya unsur kesengajaan.<sup>13</sup>

Untuk menghindari pelanggaran lalu lintas maka diharapkan warga mengetahui dan patuh terhadap peraturan-peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan jiwa, maka setiap warga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang terdapat di jalan raya.

#### 4. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan (Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut :

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

---

<sup>13</sup>Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- 2) Melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka, dan sebagainya.
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, P3K, dll.
- 5) Mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.
- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor yang ditetapkan POLRI.
- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM.
- 8) Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI.
- 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan lakukan kegiatan lain/ dipengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.
- 10) Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.
- 11) Mengendarai kendaraan bermotor tidakenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll.
- 12) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan.



- 13) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK, tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
- 14) Mengemudikan kendaraan bermotor/penumpang yang duduk di samping tidak mengenakan sabuk keselamatan.
- 15) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm.
- 16) Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm SNI.
- 17) Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang.
- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari dan kondisi tertentu.
- 19) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan bolak/balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu weser atau tangan.
- 20) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur/bergerak ke samping tanpa member isyarat.
- 21) Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api mulai ditutup.
- 22) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan.

- 23) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir darurat.
- 24) Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda.
- 25) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/lajur kiri, tidak hentikan kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama berjalan.
- 26) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan.
- 27) Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain ditempat pemberhentian.
- 28) Mengemudikan mobil barang untuk angkut orang.
- 29) Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan/turunkan penumpang lain disepanjang jalan.
- 30) Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan.
- 31) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak patuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan.
- 32) Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan.

- 33) Orang yang kemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin.
  - 34) Tidak asuransikan tanggung jawabnya untuk ganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga.
  - 35) Tidak asuransikan awak kendaraan dan penumpang.
5. Pengertian Pengantar Jenazah

Pengantar Jenazah adalah beberapa orang yang secara bersama-sama atau beriringan, bergerombol, berkelompok atau secara massal mengantarkan jenazah ke liang lahat. Biasanya para pengantar Jenazah menggunakan Kendaraan Bermotor untuk mengantar jenazah atau jalan kaki.<sup>14</sup>

#### **B. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas**

Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 dapat kita ketahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 316 ayat (1) adalah :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, pasal 275 ayat (1), pasal 276, pasal 278, pasal 279, pasal 280, pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287, pasal 288, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296, pasal 297, pasal

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 358.

298, pasal 299, pasal 300, pasal 301, pasal 302, pasal 303, pasal 304, pasal 305, pasal 306, pasal 307, pasal 308, pasal 309, dan pasal 313 adalah pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) yang diatur dalam pasal-pasal yang berkaitan sebagai berikut :

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 274 adalah :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 275 ayat (1) adalah:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengamanan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 280 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 281 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 282 adalah :

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 283 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 284 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 285 adalah :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan-jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk

arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 286 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan baik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) Jo. pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 287 adalah :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat

- (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi atau sinar sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 106 ayat (4) huruf f, atau pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan



kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 288 adalah :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 293 adalah :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 294 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 295 adalah :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 297 adalah :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 299 adalah :

- (1) Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Adapun penjelasan tentang isi dari Pasal 300 adalah :

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang :

- a. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf c;

- b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- c. Tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf e.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari uraian pasal-pasal mengenai lalu lintas di atas dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan diatur oleh Undang-Undang tidak terkecuali di dalam berkendara di jalan raya.

### ***C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan***

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di pahami bahwa pada awalnya, kejahatan hanyalah merupakan “cap” yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. ukuran pertama dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah norma-norma yang hidup dan dianut oleh masyarakat setempat, tentunya sukar untuk menggolongkan jenis-jenis perbuatan yang dapat disebut dengan kejahatan. Kesukaran ini muncul sebagai dampak dari adanya keberagaman suku dan budaya. Bagi suatu daerah suatu

---

<sup>15</sup>Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *KUHP, KUHP*, h. 319-340.

perbuatan mungkin merupakan suatu kejahatan, tetapi di daerah lain perbuatan tersebut bisa saja tidak dianggap sebagai kejahatan<sup>16</sup>

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak manusia diciptakan yang dimulai dengan tindakan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk memberi penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya yang disebut manusia. Pembangkangan ini kemudian diteruskan dengan janji iblis untuk selalu menggoda manusia hingga akhir zaman. Konflik interest antara manusia dan iblis ini dapat dipandang sebagai embrio kejahatan. Bermula dari perasaan iri, sombong, dan dengki kejahatan itu dimulai.<sup>17</sup>

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor yang berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran klasik, aliran kartografi, aliran tipologi, dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

---

<sup>16</sup>Arief,Mansur.*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118.

<sup>17</sup>Maskun, *Pengantar Cybercrime* ( Makassar: Pustaka Pena Press Makassar, 2011), h. 73.

Beberapa aspek sosial oleh kongres ke-8 PBB Tahun 1990 di Havana, Cuba, diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain :

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta latihan yang tidak cocok atau serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena 81 proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Keadaan-keadaan/ kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke Negara-negara lain.
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya *rasisme* dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang social, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya.

- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut di atas.
- i. Meluasnya aktifitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.<sup>18</sup>

Menurut saya berdasarkan uraian diatas Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melakat di mana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim berganti-ganti dari tahun ke tahun. Begitupun dengan aspek-aspek yang mendorong terjadinya kejahatan atau tindak pidana terus berkembang mengikuti perkembangan zaman maka dibutuhkan pula peran aktif dari semua aspek pemerintahan dan masyarakat untuk menaggulangi hal-hal yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana sebagai bentuk pencegahan.

#### ***D. Upaya Penanggulangan Kejahatan***

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat diseluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum

---

<sup>18</sup><http://old.Its.ac.id/berita.php?nomer=5365>

pada umumnya dirumuskan dalam Undang-Undang yang dipertanggungjawabkan aparat Pemerintah untuk menegakkannya terutama pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Menurut Sudarto, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

- a. *Criminal application* (penerapan hukum pidana) contohnya: Penerapan pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 Tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
- b. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana) contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan maka secara tidak langsung memberikan *prevensi* (pencegahan) kepada public walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.
- c. *Influencing views of society on crime and punishment* (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mas media) contohnya : Mensosialisasikan suatu undang-undang dengan



memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.<sup>19</sup>

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat<sup>20</sup>

Solusi Preventif adalah cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1981), h. 47

<sup>20</sup> Sudarto, *Penanggulangan Kejahatan*, h. 49

<sup>21</sup> Sudarto, *Penanggulangan Kejahatan*, h. 78

Berdasarkan kutipan di atas, solusi untuk menghentikan kejahatan, baik yang sudah mulai maupun sedang berlangsung dapat dicegah dengan cara pemberian ganti rugi bagi mereka yang menderita akibat kejahatan yang dilakukan si pelaku.

#### **E. Tinjauan menurut Pandangan Islam**

Kematian adalah sesuatu yang pasti. Dalam hidup kita, pasti kita sering melihat iring-iringan orang mengantar jenazah, atau bahkan kita sendiri turut mengiringkan jenazah seseorang.

Dalam hadist muslim menyatakan tentang pengurusan jenazah yang benar dan pahala apa yang di dapatkan.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ حَيَّوَهَارٍ وَنَبْسَعِيدُ الْأَيْلِيُّ وَالْفُظْلُهَا رُوْنُو حَرْمَلَةُ قَالَهُارُوْ حَدَّثَنَا وَقَالَ لَا خَرَأْنَا خَيْرَنَا ابْنُو هَبَاءَ خَيْرَ نَبِيٍّ وَنَسْعَانَا بَنَشْهَاقَا لَحْدَ ثَنِ عِبْدِ الرَّحْمَنِ مَرْمَزَالَا عَرَجْنَا تَابَاهِرِيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يَصِلَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تَدْفَنَ لَهُ قِيرَاطٌ نَقِيلُ وَمَا الْقِيرَاطُ نَقَالُمَثَلًا لَجَبَلَيْنَا الْعَظِيمَيْنِ  
 أَنْتَهَجَدِثْنَا بِأَبِي الطَّاهِرِ وَزَادَ الْخَرَأْنَا لَابَنَشْهَاقَا لَحْدَ ثَنِ عِبْدِ اللَّهِ بِنَعْمَرْوَكَا نَابَنَعْمَرْ يَصْلِي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَ هَدْيَا بِيَهْرِيرَةَ قَالَ لَقَدْ ضَيَعْنَا قِرَارِي طَ كَثِيرَةً وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرَفَةَ عَبْدُ بَنَحْمِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كَلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ  
 أَنَّ بِيَهْرِيرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْهَا لَجَبَلَيْنَا الْعَظِيمَيْنِ وَلَمِيدُ كَرَامَا بَعْدَ هُوَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى  
 حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَتَّى تَضَعُ فِي اللَّحْدِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ الْيَشِيدَ حَدَّثَنَا ثَنِيَّابُ  
 عَنْ جَدِّيقَا لَحْدَ ثَنِ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَنَشْهَاقَا لَحْدَ ثَنِ جَالَعْنَا بِيَهْرِيرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 مَثَلُ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ لَوْ مَنَّا تَبَعَهَا حَتَّى تَدْفَنَ

Artinya :

*Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya dan Harun bin Sa'id Al Aili -dan lafazh milik Harun dan Harmalah, Harun berkata- telah menceritakan kepada kami -sementara dua orang yang lain berkata- telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj bahwa Abu Hurairah berkata;*

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang turut menyaksikan pengurusan jenazah hingga ia menshalitinya, maka baginya pahala sebesar satu qirath. Sedangkan siapa yang turut menyaksikan pengurusannya hingga jenazah itu dimakamkan, maka baginya pahala sebesar dua qirath." Lalu ditanyakanlah, "Apakah itu dua qirath?" beliau menjawab: "Seperti dua gunung yang besar."*

*sampai disinilah haditsnya Abu Thahir. Kemudian dua orang itu menambahkan; Ibnu Syihab berkata, Salim bin Abdullah bin Umar berkata; Ibnu Umar pernah menshalati jenazah lalu ia bubar dan pergi. Dan ketika hadits Abu Hurairah sampai padanya, ia pun berkata, "Sungguh, kita telah menyia-nyiakan banyak qirath." Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdul A'la -dalam jalur lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Rafi' dan Abdu bin Humaid dari Abdurrazaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hingga sampai pada; "Seperti dua gunung yang besar." Dan ia tidak menyebutkan sesudahnya. Dan di dalam haditsnya Abdul A'la tercantum; "Hingga pengurusan (jenazah itu) selesai." Sementara di dalam riwayat Abdurrazaq tercantum; "Hingga (jenazah itu) diletakkan di dalam liang lahad." Dan telah menceritakan kepadaku Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku ia berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail bin Khalid dari Ibnu Syihab ia berkata, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki*

*dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yakni seperti haditsnya Ma'mar. dan ia menyebutkan; "Hingga (jenazah itu) dikebumikan."<sup>22</sup>*

Kutipan diatas menjelaskan bahwa begitu besarnya pahala yang didapatkan jika mengurus jenazah dengan benar, mulai memandikan jenazah, pengafanan, menyalati jenazah, dan sampai pengantaran jenazah ke liang lahat dengan hikmat, tanpa mengganggu pengguna jalan yang lain, anarkis atau merusak fasilitas umum di saat iring- iringan djalan.

#### 1. Adab saat mengantar Jenazah

##### a. Bersikap Tenang

Hendaknya bersikap tenang dan diam ketika mengantar jenazah ke makam. Imam Nawawi berkata, " Ketahuilah, sesungguhnya yang benar adalah bersikap tenang ketika mengantarkan jenazah, sebagaimana yang dipraktekkan oleh kalangan salaf . Tidak perlu mengeraskan suara dengan bacaan al-Qur'an, zikir, atau bacaan yang lain. Hal ini dianjurkan karena akan membuat jiwa seseorang lebih tenang dan pikirannya lebih terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, dan inilah yang dituntut dalam kondisi tersebut." (*dalam Kitab Asna al-Muthalib Syarh Raud ath-Thalib*).

##### b. Disegerakan

Bila yang meninggal orang saleh, hendaknya disegerakan. Di dalam sebuah Hadits, Rasulullah bersabda, " *Bila jenazah diangkat dan orang-*

---

<sup>22</sup>Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Ihya At-Turast Al-Arabi, t.t.) Jus II, h. 625.

*orang mengusungnya di atas pundak, maka bila jenazah itu baik, dia berkata, 'percepatlah perjalananku'. Sebaliknya, bila jenazah itu tidak baik, dia akan berkata, 'Celaka ! mau dibawa ke mana aku ? 'Semua makhluk mendengar suaranya kecuali manusia. Bila manusia mendengarnya, pasti pingsan. "* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

c. Berdiri Sejenak Di Sisi Kuburan

Orang-orang yang mengantar jenazah, setelah memakamkan hendaknya berdiri sejenak di sisi makam guna mendoakannya. Utsman RA. berkata, *"Nabi jika selesai menguburkan jenazah beliau berdiri sejenak dan bersabda, 'Mohonlah ampunan bagi saudara kalian dan mintalah keteguhan untuknya , karena dia sekarang sedang ditanya".* (Riwayat Abu Daud dan shahih menurut Hakim)

d. Menaburkan Tanah Setelah Pemakaman

Dalam Hadits Ibnu Majah *kitab Janaiz* (catatan tentang jenazah) yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah , pada suatu saat Nabi Muhammad *ta'ziah* (melayat) terhadap sahabatnya yang meninggal. Setelah menshalatkannya kemudian ia ikut mengantar jenazah ke kuburan. Setelah dikubur, kemudian beliau mendatangi makam tersebut sambil menggenggam tanah dan menaburkannya di atas kuburan sebanyak 3 kali. Dimulai dari arah kepala.

e. Nasehat Kematian dan Kehidupan Akhirat

Sebelum berdoa, dapat menyampaikan nasihat singkat tentang kematian dan kehidupan akhirat. Hal ini dimaksudkan agar jiwa orang-orang yang

hadir menjadi lebih tenang dan lebih siap untuk bermunajat kepada Allah SWT.<sup>23</sup>

f. Mengambil Pelajaran

Hendaknya para pengantar mengambil pelajaran berharga atas pengalamannya mengusung dan mengantarkan jenazah. Nabi bersabda :  
<sup>24</sup>"Jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah, dengan demikian kalian akan mengingat akhirat". (Riwayat Ahmad)

2. Dimakruhkan saat mengantar Jenazah

- a. Berdzikir keras, membaca sesuatu atau pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan suara keras. Berkata Ibnul Mundzir: "Kami mendapat riwayat dari Qeis bin 'Ibad yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah saw. tidak menyukai mengeraskan suara pada tiga hal: memenuhi jenazah, ketika berdzikir, dan sewaktu berperang. Dan dianggap makruh oleh Sa'id bin Musaiyab , Sa'id bin Jubeir, hasan, Nakh'i, Ahmad dan ishak bila seorang mengucapkan di belakang jenazah. Berkata Fudheil bin 'Amar : "Sementara Ibnu Umar memenuhi jenazah, tiba-tiba terdengar olehnya seseorang mengucapkan 'Astaghfirullah', mudah-mudahan Allah mengampuninya! "Maka kata Ibnu Umar : "Semoga Allah tidak akan memberi ampunan bagimu !", berkata Nawawi : "Ketahuilah bahwa yang benar adalah seperti

---

<sup>23</sup><http://www.jadipintar.com/2013/11/Adab-Dalam-Mengantar-Jenazah-Dan-Hal-Hal-Yang-Dimakruhkan.html>, Senin 7-12-2015, jam 17:30

<sup>24</sup><http://www.jadipintar.com/2013/11/Adab-Dalam-Mengantar-Jenazah-Dan-Hal-Hal-Yang-Dimakruhkan.html>, Senin 7-12-2015, jam 17:30

- yang dilakukan oleh Salaf - orang-orang yang terdahulu - berupa berdiam diri sewaktu mengiringkan jenazah, sampai tak mengeluarkan suara keras, baik membaca sesuatu, berdzikir dan sebagainya.
- b. Mengiringkannya dengan perapian, karena itu merupakan suatu perbuatan *jahiliyah*. Berkata Ibnul Mundzir : "Hal itu dianggap makruh oleh paa anggota yang dikenal. "Tapi seandainya pemakaian dilakukan malam hari, sampai membutuhkan penjelasan, maka tak ada salahnya. Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Ibnu Abbas : "Bahwa Nabi saw. pernah memasuki suatu kuburan di malam hari, maka dinyalakan lampu. "Katanya pula : " Hadits Ibnu Abbas ini adalah hadits hasan."
- c. Duduknya si pengiring sebelum jenazah ditaruh di bumi. Berkata Bukhari : "Barang siapa mengiringkan jenazah, janganlah ia duduk sebelum ditempatkan dari bahu orang-orang yang memikul. Jika ada yang duduk, maka harus disuruh berdiri! " Lalu diriwayatkannya dari Abu Sa'id al Khudri RA. hadits Rasulullah SAW. : "Jika kamu melihat jenazah, harus berdiri! Dan siapa yang mengiringkannya, janganlah ia duduk sebelum ditempatkan."
- d. Berdiri ketika jenazah lewat. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Waqid bin'Amar bin Sa'ad bin Mu'adz yang menceritakan: "Saya lihat jenazah lewat di bani salamah, lalu saya berdiri. Maka berkatalah Nabi bin Jubeir:" Duduklah, dan saya akan menjelaskan pada Anda keterangan yang sah tentang masalah ini. "Mas'ud bin Hakim

ar-Rusqi menyampaikan padaku bahwa ia mendengar Ali bin Abi Thalib RA. Berkata : "Dulu Nabi SAW. menyuruh kami berdiri bila jenazah lewat, kemudian setelah itu ia duduk dan menyuruh kami untuk duduk." hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut : "Kami lihat Nabi saw. berdiri, maka kamipun berdirilah, lalu ia duduk, maka kami duduk pula", artinya bila ada jenazah. Menurut Tarmidzi, hadits Ali ini hasan lagi shahih dan pada sanadnya ada empat orang tabi'in yang beberapa orang diantara mereka meriwayatkan dari lainnya, hingga menjadi praktek bagi sebagian anggota. Dan menurut Syafi'i, hadits tersebut adalah yang paling sah tentang masalah ini . Hadits ini juga membatalkan – *nasakh* - hadits pertama : "Jika kamu melihat jenazah, kamu harus berdiri !" Berkata Ahmad : "Jika suka, ia bisa berdiri, dan bisa pula tidak." Sebagai alasannya adalah karena sebagaimana diriwayatkan, Nabi SAW. awalnya berdiri, kemudian baru duduk." Demikianlah pula pendapat Ishak bin Ibrahim.<sup>25</sup>

- a) Mengiringi jenazah bagi wanita. berdasarkan hadits dari Ummu 'Athiyah, katanya : "Kami dilarang buat mengiringkan jenazah, tetapi tidaklah dikerasi." (Riwayat Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah)
- b) Pendapat Malik sama sekali tidaklah makruh bila wanita yang telah berumur pergi mengantar jenazah, begitu juga bila wanita yang masih

---

<sup>25</sup><http://www.jadipintar.com/2013/11/Adab-Dalam-Mengantar-Jenazah-Dan-Hal-Hal-Yang-Dimakruhan.html>, Senin 7-12-2015, jam 17:30



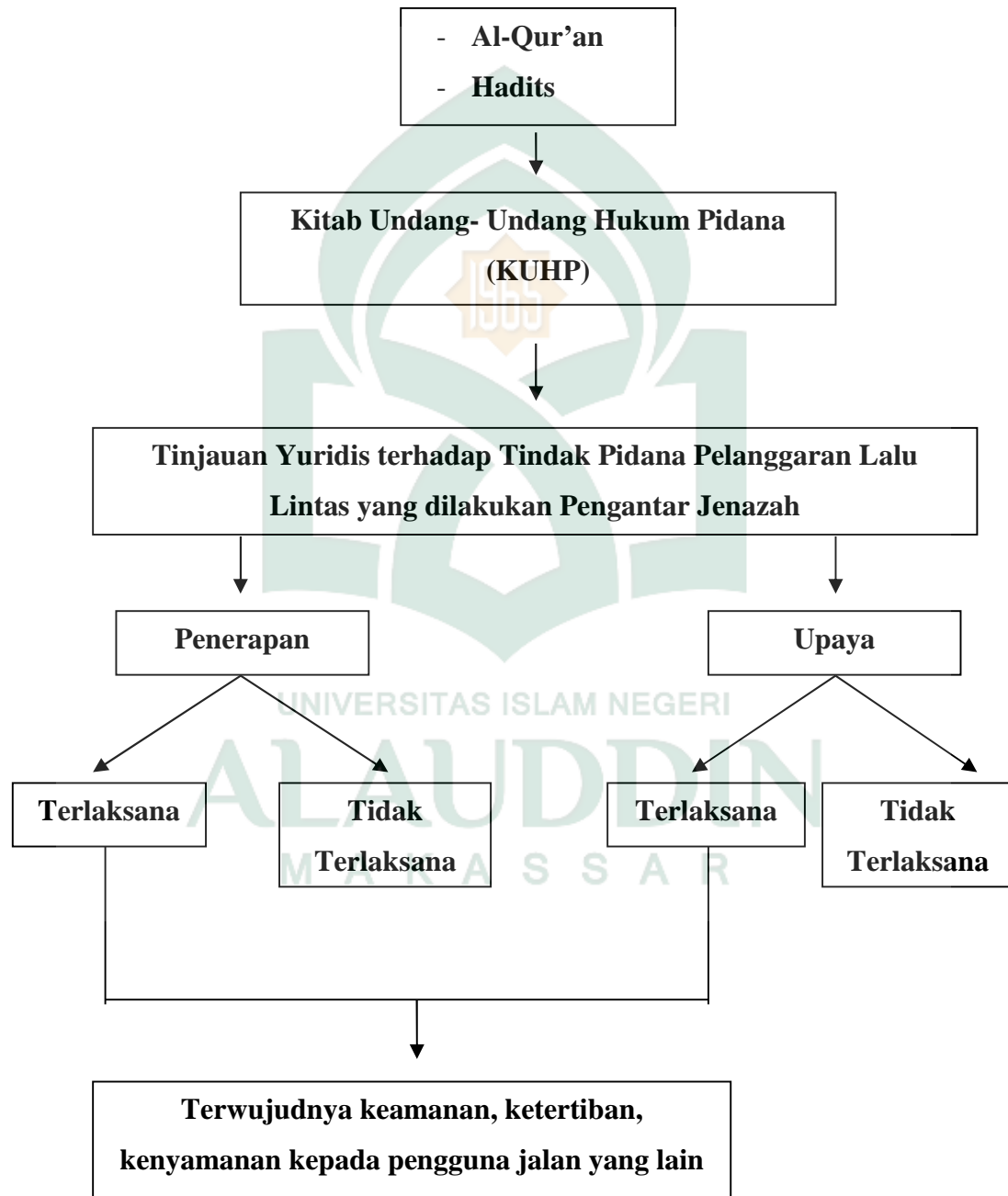
muda usia mengantar jenazah seseorang yang kematiannya dirasakannya sebagai musibah besar atas dirinya, dengan syarat ia pergi itu secara sembunyi-sembunyi dan tidak akan mengakibatkan timbulnya fitnah.

- c) Ibnu Hazmin berpendapat bahwa alasan yang dipakai oleh jumhur itu tidaklah sah dan baginya tak ada salahnya bagi wanita mengiringkan jenazah. "Bagi kami tidaklah makruh hukumnya bila wanita mengantarkan jenazah, dan kami tidak melarang mereka berbuat itu. Keterangan-keterangan yang melarangnya tidak satu pun yang sah, karena kalau tidak *mursal*, maka diterima dari orang yang tidak dikenal atau yang tak dapat dipercaya ucapannya. "Bahkan ada keterangan sah yang bertentangan dengan itu, yakni yang diriwayatkan dari jalan Syu'bah bin 'Waki' yang diterimanya dari Hisyam bin 'Urwah dari Wahab bin Kaisan, berikutnya dari Muhammad bin 'Amar bin' Atha yang diterimanya dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW. sedang mengantarkan jenazah, tiba-tiba Umar melihat seorang wanita, maka ia berseru memanggilnya. Maka sabda Nabi SAW. : “Biarkanlah itu, hai Umar, karena air mata bisa mengucur dan jiwa menderita.”<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup><http://majalah.hidayatullah.com/2011/08/adan-mengantar-jenazah/>, Selasa 7-12-2015, jam

### F. Kerangka Konseptual



### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mengelola dan menafsirkan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran dan kesimpulan dari keseluruhan penulis. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, subjek objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>1</sup>

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* (hukum positif), Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library research*. Penelitian ini menekankan pada segi-segi *yuridis*, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

##### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder :

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan, dengan cara intrview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang jelas. Dan sumber

---

<sup>1</sup>Muh Khalifah Mustamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*( Makassar: Alauddin Pres, 2009), h. 19.

data tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.

- b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan teknik untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *library reseacrh*, dengan jelas menelaah peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, tulisan makalah, dokumen atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu :

- a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang membicarakan jawaban atas pertanyaan itu<sup>2</sup>. Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur yang berarti penulis melakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis kepada informannya untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Untuk

---

<sup>2</sup> Lexy J. meleong, *Metodologi penelitian kualitatif* ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011 ), h. 189.

mendapatkan informasi mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah.

- b. Observasi adalah metode atau cara-cara untuk mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha yang desengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasi.<sup>3</sup>
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau data-data yang bersangkutan.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen harus “divalidasi” sejauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. Adapun alat-alat instrumen disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
- b. Buku catatan dan alat tulis, alat ini berfungsi untuk mencatat semua percakapan dari sumber data.
- c. Camera, alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informannya.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

- a. Pengolahan data

---

<sup>3</sup>S.Nasution, *Metode Research* ( jakarta: PT.Bumi Aksara,2006), h. 106.

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

- 1) *Klasifikasi* data adalah menggolongkan atau mengkatagorikan data yang dihasilkan oleh penelitian.
- 2) *Reduksi* data adalah memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- 3) *Koding* data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
- 4) *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data didekripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

b. Analisis data

Teknik analisis data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan memilah, mengklasifikasi, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

### **G. Pengujian dan Keabsahan Data**

Dalam hal ini penulis memakai beberapa teknik dalam pengujian dan keabsahan data, yaitu antara lain :

a. Perpanjangan Keikutsetraan

Penulis akan membutuhkan waktu yang panjang dalam hal ini peneliti tinggal dilapangan untuk meneliti sampai pengumpulan data tercapai.

b. Trigulasi

Trigulasi adalah tekni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

c. Pemeriksaan Sejawat melalui diskusi

Teknik dilakukan yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara yang diperoleh dalam bentuk diskusi dan hasil diskusi tersebut bisa dijadikan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan.

d. *Auditing*

Peneliti akan menyediakan segala macam pencatatan yang diperlukan dan bahan-bahan peneliti yang tersedia dan merangkum semua data yang telah dilakukan melalui pengamatan, wawancara, rekaman, dll.

## BAB IV

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN PENGANTAR JENAZAH

#### *A. Gambaran Umum Kota Makassar*

Kota Makassar adalah sebuah kota madya dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi selatan. Kota Makassar secara geografis terletak antara 119 derajat bujur timur dan 5'8 derajat lintang selatan. Wilayah kota Makassar berbatasan dengan selat Makassar di sebelah barat, kabupaten kepulauan pangkajene di sebelah utara, kabupaten maros di sebelah timur dan kabupaten maros di sebelah timur dan kabupaten gowa di sebelah selatan. Luas wilayah kota Makassar 175,77 Km 2 yang terbagi menjadi empat belas kecamatan. Kota ini termasuk kota kosmopolis, banyak suku bangsa tinggal di sini. Di kota ada suku Makassar, suku Bugis, Toraja, dan Mandar. Di kota ini ada pula komunitas Tionghoa yang cukup besar. Makanan khas Makassar yang cukup terkenal adalah soto Makassar, roti maros, kue tori' dll. Dewasa ini perdagangan kota Makassar tergolong maju. Pusat-pusat perniagaan dan pasar-pasar tradisional, pasar grosir sampai mal-mal modern berkembang pesat. <sup>1</sup>

Kota metropolitan Makassar adalah ibukota dari provinsi Sulawesi selatan, terletak antara 119'241'17'38" Bujur timur dan 5'8'6'19" Lintang selatan yang berbatasan dengan kabupaten maros selatan utara, kabupaten maros sebelah timur,

---

<sup>1</sup>Sulawesi Selatan Dalam Angka 2007 (01-7-2007) BPS Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Penancangan No. 4, Serang 42124 [http://aa-makassar.blogspot.com/2009/12/profil-kota-makassar\\_7742.html](http://aa-makassar.blogspot.com/2009/12/profil-kota-makassar_7742.html) (5 November 2015)



kabupaten gowa sebelah selatan, selat Makassar di sebelah barat sebelumnya berubah nama menjadi kotamadya Ujung Pandang. Yang bias di sebut kota “Anging Mammiri” yang berarti “kota hembusan anging sepoi sepoi basah” dan juga terkenal dengan “Pantai Losari”nya yang indah, tempat menikmati hembusan angin laut yang menyegarkan dan menyaksikan terbenangnya matahari serta keindahan panorama laut kota yang bersuhu sekitar 22 – 33 ‘ C ini, memiliki area seluas 175,77Km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Luas laut di hitung dari 12 mil dari daratan sebesar 29,9 km<sup>2</sup>, dengan ketinggian topografi dengan kemiringan 0’ sampai 9’. Terdapat 12 pulau-pulau kecil, 11 diantaranya telah diberi nama dan 1 pulau yang belum diberi nama. Kota Makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh dua sungai yaitu sungai Tallo dan sungai Jeneberang.

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2’ (datar) dan kemiringan lahan 3-15’ (bergelombang) dengan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara umum topografi kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Bagian barat ke arah utara relative rendah dekat dengan pesisir pantai;

---

<sup>2</sup> Nurdin Hemmu, *Makassar Dalam Angka 2012* .<http://makassartabagus.blogspot.com/2013/11/profil-kota.html> (5 November 2015)

- b. Bagian timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di kelurahan Antang kecamatan Panakkukang.

Perkembangan fisik kota Makassar cenderung mengarah ke bagian timur kota Makassar cenderung mengarah ke bagian timur kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di kecamatan Biringkaraya, Tamalanrea, Mangala, Panakkukang, dan Rappocini.<sup>3</sup>

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar hingga daerah timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah selatan ke utara merupakan koridor utama kota pusat kegiatan industri Makassar.

Dari dua sungai besar yang mengalir di dalam kota secara umum kondisinya belum banyak di manfaatkan, sudah banyak hasil penelitian yang dilakukan terhadap sungai-sungai ini dimulai dari rencana bagaimana menjadikannya sebagai jalur alternative baru bagi transportasi kota.

Hanya saja, sejalan dengan perkembangannya saat ini dinamika perkembangan wilayah dengan konsentrasi pembangunan seakan terus berlomba di atas lahan kota yang sudah semakin sempit dan terbatas. Sebagai imbasnya tidak sedikit lahan yang terpakai saat ini menjadi lain dalam peruntukannya, hanya karena lahan yang dibutuhkan selain sudah terbatas, juga karena secara rata-rata konsentrasi kegiatan pembangunan cenderung hanya pada satu ruang tertentu saja.

---

<sup>3</sup> Pokja AMPL, *Buku Putih Sanitasi Kota Makassar-2011 Pdf*, h. 1(5 November 2015)

Berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan, kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang sehingga tropis. Sepanjang 5 tahun terakhir suhu udara rata-rata kota Makassar berkisar antara 25' C sampai 33' C. curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret dengan rata-rata curah hujan 227 mm dan jumlah hari hujan berkisar 144 hari per tahun. Untuk daerah-daerah yang mendekati pegunungan, yaitu daerah sebelah timur, hujan basah cenderung sampai pada bulan Mei, sedangkan pada daerah pantai, umumnya sampai bulan April.

Berdasarkan data tahun 2010 (BPS Kota Makassar, 2011) wilayah administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, 143 kelurahan, dengan 971 RW, dan 4789 Rt, dengan total luas wilayah administrasi kota Makassar adalah 175,77 km<sup>2</sup>. Presentase luas wilayah kecamatan yang tergolong cukup luas adalah kecamatan Biringkanaya (27,43%), Tamalanrea (18,11%), Mangala (13,73%), dan Tamalate (11,50%) dari luas total wilayah Kota Makassar.<sup>4</sup>

a. Kedudukan kecamatan

Kecamatan dalam struktur birokrasi pemerintah daerah merupakan institusi terdepan dalam berhubungan dengan masyarakat organisasi kecamatan merupakan *front office* pemerintah dengan masyarakat dapat pula disebut sebagai organisasi jalanan (*stree level buareucracy*). Organisasi ini sangat menentukan citra baik dan buruknya layanan dan pengayoman serta perlindungan pemerintah atas masyarakatnya, citra pemerintah sangat tergantung dari kinerja kecamatan dan

---

<sup>4</sup> Pokja AMPL, *Buku Putih Sanitasi Kota Makassar-2011 Pdf*, h. 3(9 November 2015)

kelurahan khususnya. Salah satu factor yang menentukan kinerja organisasi pemerintah kecamatan adalah adanya kewenangan yang jelas yang harus dikerjakan oleh kecamatan.<sup>5</sup>

Keberadaan kecamatan dalam suatu daerah akan memberikan dampak positif terhadap daerah tersebut, kedudukan kecamatan merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang membantu menjalankan dan mengatur daerah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Kedudukan kecamatan dalam pemerintah daerah sebagaimana terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, pasal 47 menyebutkan bahwa :

- a. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- b. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- c. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.<sup>6</sup>
- b. Tugas pokok kecamatan.

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan

---

<sup>5</sup>Anwar Sanus, *Kajian Penataan Kewenangan Kecamatan Kabupaten Wajo*, (Makassar: Ianmakassar, Tahun 2005). <http://www.Ianmakassar.com/simpenelitian/detail-2/1/53/kajian-penataan-kewenangan-kecamatan-kabupaten> (13 November 2015)

<sup>6</sup>Herry Iskandar, PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, (Makassar, 2009), h. 43

perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan pimpinan oleh Camat.<sup>7</sup>

Tugas kecamatan dalam suatu daerah sangat penting, mengingat peran Kecamatan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di Pedesaan/Kelurahan. Salah satu perangkat daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat setempat, hal ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten/ Kota.

Tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 48 menyebutkan bahwa :

- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. Camat dalam melaksanakan tugas pokok ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - 2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - 6) Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan;

---

<sup>7</sup>Tuesday, *Pemerintah Kecamatan*, (Makassar: Tugino thok No comments, Thaun 2012) <http://mastugino.blogspot.com/2012/09/pemerintah-kecamatan.html>.(13 November 2015)

- 7) Mengoordinasikan kegiatan pengolaan kebersihan;
- 8) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
- 9) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 10) Pelaksaian kesekretariatan.

c. Susunan organisasi kecamatan

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat;
  - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b) Sub bagian keuangan dan perlengkapan;
- 3) Seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- 4) Seksi pemberdayaan masyarakat;
- 5) Seksi perekonomian dan pembangunan;
- 6) Seksi kesejahteraan sosial;
- 7) Seksi pengolaan kebersihan.<sup>8</sup>

d. Kedudukan kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu pejabat Negara yang berada di daerah Kabupaten/Kota/kecamatan yang berperan penting dalam membantu pencapaian

---

<sup>8</sup>Herry Iskandar, PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, (Makassar, 2009), h. 43.

harapan suatu wilayah kecamatan untuk memberikan pengayoman, perlindungan, keamanan, dan kenyamanan serta ketenangan dalam masyarakat.

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan perincian tugas kepolisian Negara Republik Indonesia. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

---

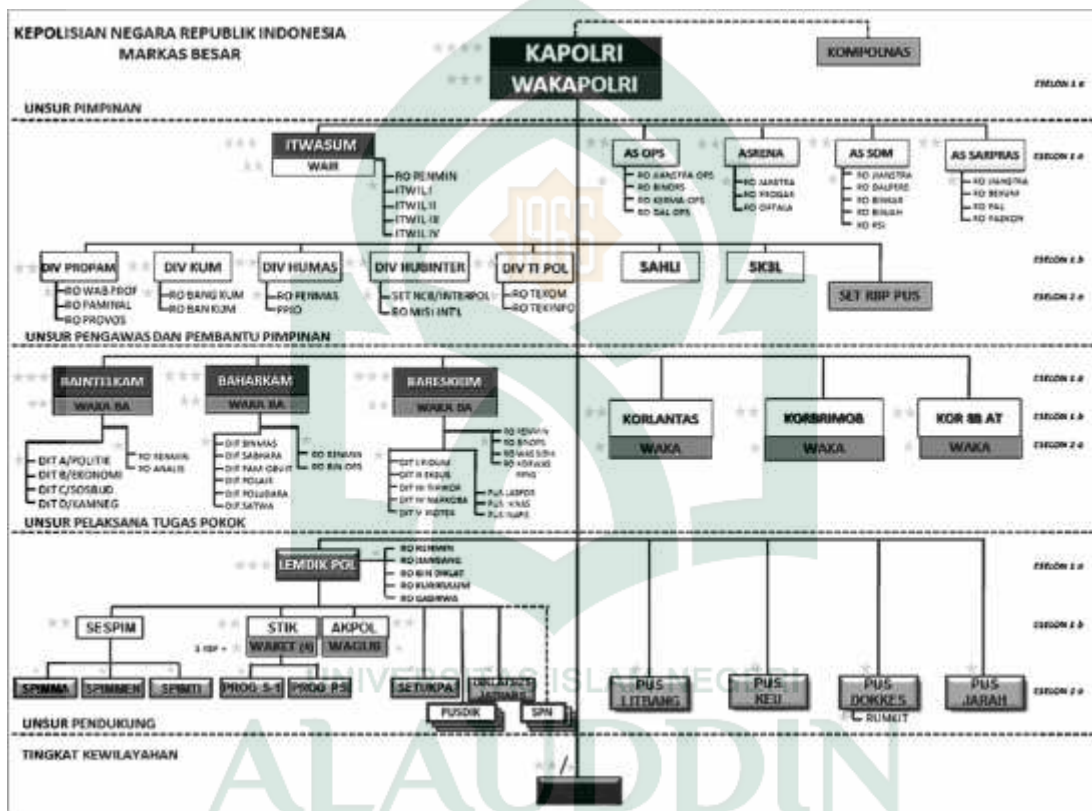
<sup>9</sup>Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan:USU Press, 2009), h. 9.

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2009), h. 113

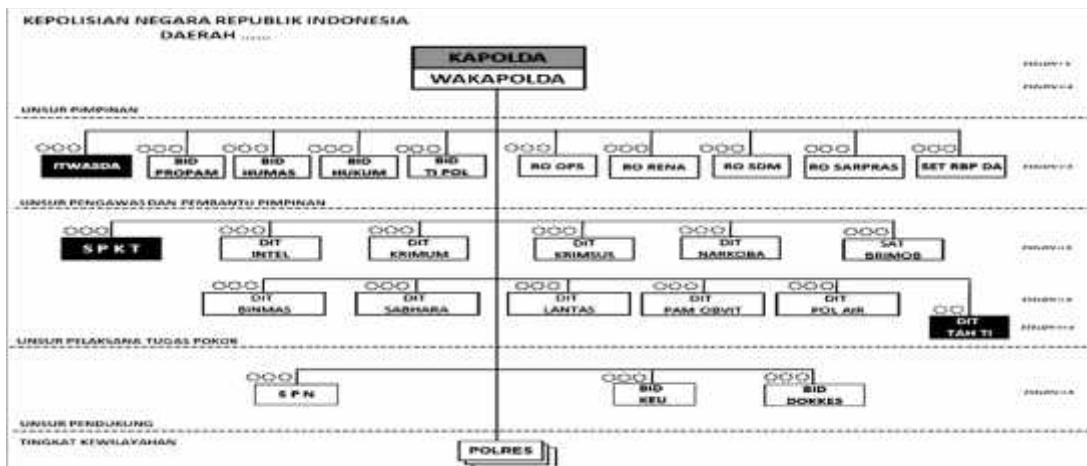


## e. Struktur organisasi kepolisian.

## a) Mabes Polri



## b) Polda Sul-Selbar.







*lintas seperti tidak pakai helm, berbocengan tiga dan menerobos lampu merah. Itu semua kami maklumi karena si pengantar jenazah lagi dalam keadaan berduka selama tidak melampaui batas seperti mengganggu pengendara lain dan bertindak anarkis dijalanan seolah-olah milik sendiri, lebih-lebih merusak kendaraan orang lain itu akan kami tindak lanjuti sesuai Undang-Undang Lalu Lintas yang berlaku, memang secara khusus tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengantar jenazah akan tetapi pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah akan disesuaikan dengan Undang-Undang pelanggaran lalu lintas secara umum yakni UU No. 22 Tahun 2009. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah berhubungan dengan masalah sosial.”<sup>11</sup>*

Menurut bapak Syahrul (selaku Kaur. Minku) “apabila ada pengantar jenazah yang berbondong-bondong dan memperlebar arah jalan serta mengganggu pengendara lain maka langkah yang dilakukan oleh oknum kepolisian khususnya Polantas sebagai pengatur tertib berlalu lintas maka perlu adanya komunikasi antara satu dengan yang lain agar pelanggaran lalu lintas dan tindak kriminal yang dilakukan oleh pengantar jenazah tidak meresahkan pengendara dan pengguna jalan lain.”<sup>12</sup>

Menurut bapak Kahar. A (selaku Kanit Lantas) “penerapan hukum yang kami lakukan sebagai aparat hukum khususnya bagian Unit Lalu Lintas yaitu setiap

---

<sup>11</sup>Kasman. SH (46 tahun), Batilang Polrestabes Makassar, Wawancara, Makassar, 29 Oktober 2015, hari Kamis.

<sup>12</sup>Syahrul (41 tahun), Kaur. Minku Polrestabes Makassar, Wawancara, Makassar, 02 November 2015, hari Senin

*adanya rombongan pengantar jenazah selalu diiringi dengan menertibkan jalur yang dilalui oleh ambulans dan para pengantar jenazah sama halnya dengan pejabat Negara yang berkepentingan dan pemadam kebakaran yang dalam kondisi darurat maka kami aparat oknum kepolisian melakukan penertiban dan pengawalan secara gratis guna memenuhi pelayanan kami terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Penerapan ini berdasarkan dalam Undang-Undang Dasar No 22 tahun 2009. Karena tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para pengantar jenazah, maka dari itu kami mengacu kepada peraturan umum.”<sup>13</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh rombongan pengantar jenazah di Kota Makassar dilimpahkan ke peraturan umum karena tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para pengantar jenazah. Kepolisian hanya bertindak menertibkan jalan dan melakukan pengawalan secara gratis. Untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan kepolisian wajib mengatur dan berkomunikasi dengan rombongan pengantar jenazah.

### ***C. Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengantar Jenazah***

Upaya penanggulangan dalam hal ini untuk menyelamatkan sekaligus mengingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas yang

---

<sup>13</sup>Kahar. A (51 tahun), Kanit lantas Polsekta Tamalate Makassar, *Wawancara*, Makassar, 11 November 2015, hari Selasa.

dapat mengakibatkan kerugian baik bagi diri pengantar jenazah tersebut maupun orang lain.

a) *Morrality System*

Yang dilakukan dengan cara pendekatan moral untuk memberi kesadaran dan peringatan berupa himbauan kepada para pengantar jenazah serta masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, tetap menjaga keselamatan selama berkendara di jalan dengan cara tidak ngebut-ngebut di jalan, serta tidak melakukan pemaksaan dengan cara membuka jalan secara paksa di tempat yang dilalui oleh para pengantar jenazah sehingga keselamatan para pengantar jenazah dan masyarakat lainnya dapat tetap terjaga. System ini biasanya dilakukan oleh ulama, para pendidik, dan penegak hukum.<sup>14</sup>

b) Upaya Preventif

Upaya preventif meliputi segala upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran di kalangan masyarakat dengan mempersempit ruang geraknya dan mengurangi pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan memberikan informasi tentang pengaruh buruk dari suatu kejahatan dan pelanggaran.

---

<sup>14</sup>Syahrul (41 tahun), Kaur. Minku Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 02 November 2015, hari senin

Menurut Syahrul selaku Kaur. Minku Polantas Polrestabes Makassar sewaktu wawancara menyatakan , upaya preventiv yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantara lain:

- a. Melakukan penyuluhan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas dan masyarakat sekitar dengan berkordinasi dengan pihak terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kepolisian dan pemerintah setempat minimal 3 bulan sekali.
- b. Memberikan himbauan kepada masyarakat dan utamanya para`pengantar jenazah melalui media cetak, TV serta pemerintah terkait agar tetap menggunakan helm dan tetap tertib selama berkendara di jalan.
- c. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian apabila ada jenazah yang akan diantar sehingga polisi bisa mengawal serta mengamankan para pengantar jenazahnya sampai di tempat tujuan.<sup>15</sup>

Kepolisian juga berencana menjadikan penyuluhan sebagai tempat utama untuk memerangi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali terjadi di masyarakat sekitar kita. Dengan demikian usaha preventif dimaksudkan untuk mencari faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengantar jenazah di kota Makassar. Upaya preventif meliputi : preventif umum dan preventif khusus.

---

<sup>15</sup>Syahrul (41 tahun), Kaur. Minku Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 02 november 2015, hari senin

## 1. Preventif umum

Upaya ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. perhatian dan bimbingan tersebut sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk mencegah setiap tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, antara lain :

### a. Peranan keluarga

Dalam hal ini peranan keluarga sangat penting sebab masyarakat khususnya para pengantar jenazah pastilah sangat dekat dengan keluarganya sehingga keluarganya dapat menasehati mereka untuk tidak ngebut-gebut di jalan, tetap memakai pengaman saat berkendara dan tetap tertib sehingga keselamatan mereka tetap terjaga setiap saat.

### b. Peranan pemerintah

Pemerintah setempat dapat memberikan himbauan khusus kepada masyarakatnya baik melalui media cetak, TV, serta himbauan langsung yang diberikan oleh RT atau RW setempat kepada masyarakat agar tetap menggunakan helm saat mengantar jenazah dan tetap tertib.

## 2. Preventif khusus

Untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar maka orang tua atau keluarga, masyarakat, kepolisian, dan instansi-instansi yang terkait lainnya diharapkan dapat bekerjasama menanggulangi setidaknya dalam hal memberikan informasi satu sama lain sehingga semuanya dapat

terkontrol dengan baik dan semua pihak yang terkait dapat mengetahui, sehingga pencegahan atau solusi apabila pelanggaran lalu lintas terjadi yang dilakukan oleh pengantar jenazah dan pada saat mereka ingin melakukan pemberontakan dan merusak fasilitas-fasilitas umum yang ada maka semua pihak yang terkait dapat mencegah hal tersebut terjadi.

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan selama berkendara dan tetap tertib sehingga kita bisa tetap selamat di jalan. Serta melakukan system pengawasan atau pengawalan kepada para pengantar jenazah apabila ada yang mengantar jenazah tetapi tidak tertib maka pihak kepolisian akan berusaha mengamankan dengan cara mengawal mereka sampai di tempat tujuannya sehingga mereka bisa tetap tertib dan aman.<sup>16</sup>

c) Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan sebagai suatu tindakan untuk mengamankan para pengantar jenazah apabila pada saat mengantar jenazah mereka melakukan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain, melakukan perkelahian di jalan, serta membuat kekacauan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar maka polisi akan mengamankan mereka di kantor polisi dimintai

---

<sup>16</sup>Kasman. SH (46 tahun), Batilang Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 29 oktober 2015, hari Kamis.

keterangan dan diberikan nasehat agar mereka tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Sehingga kehidupan bisa tetap aman, sejahtera tanpa ada kekerasan dan pemberontakan sedikit pun.<sup>17</sup>

Dari kutipan di atas, upaya polisi dalam mengamankan para pengantar jenazah yang melakukan perusakan fasilitas umum atau melakukan perkelahian di jalan raya, serta membuat kekecauan yang dapat mengganggu pengguna jalan yang lain atau masyarakat sekitar akan diamankan di kantor polisi dan dimintai keterangan dan diberikan nasehat agar tidak mengulangi tindakan yang dapat merugikan masyarakat setempat maupun diri mereka sendiri.



---

<sup>17</sup>Kahar. A (51 tahun), Kanit lantasi Polsek Tamalate Makassar, *Wawancara*, Makassar, 11 November 2015, hari Selasa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Dari uraian di atas, maka dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah:
  - a. penerapan terkhusus tentang pengantar jenazah yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak pakai helm, berbocengan tiga dan menerobos lampu merah. Itu semua di maklumi karena sipengantar jenazah lagi dalam keadaan berduka selama tidak melampaui batas seperti mengganggu pengendara lain dan bertindak anarkis di jalanan seolah-olah milik sendiri, lebih-lebih merusak kendaraan orang lain itu akan kami tindak lanjuti sesuai Undang-Undang Lalu Lintas yang berlaku, memang secara khusus tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengantar jenazah akan tetapi pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah akan disesuaikan dengan Undang-Undang pelanggaran lalu lintas secara umum yakni UU No. 22 Tahun 2009.
  - b. Menertibkan jalur yang dilalui oleh ambulans dan para pengantar jenazah sama halnya dengan pejabat Negara yang berkepentingan dan pemadam kebakaran yang dalam kondisi darurat maka kami aparat oknum kepolisian melakukan penertiban dan pengawalan secara gratis guna memenuhi

pelayanan kami terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

2. Upaya penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah:

a. Upaya preventif

a) Upaya preventif umum, yaitu dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat. perhatian dan bimbingan tersebut sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk mencegah setiap tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

b) Upaya preventif khusus, dengan mengefektifkan upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar maka orang tua atau keluarga, masyarakat, kepolisian, dan instansi-instansi yang terkait lainnya diharapkan dapat bekerjasama menanggulangi setidaknya dalam hal memberikan informasi satu sama lain sehingga semuanya dapat terkontrol dengan baik.

b. Upaya Represif, yaitu suatu tindakan untuk mengamankan para pengantar jenazah apabila pada saat mengantar jenazah mereka melakukan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain.

## **B. *Saran***

1. Saran penulis adalah dalam memberikan pemahaman berlalu lintas harus lebih ditingkatkan misalnya melalui penyuluhan ke Masyarakat, Sekolah-sekolah, Perguruan tinggi, Koran, maupun TV tentang berlalu lintas agar para pengantar jenazah maupun masyarakat lainnya dapat pengetahuan yang lebih mengenai lalu lintas sehingga pelanggaran dapat berkurang dan dapat dihindari. Selain itu faktor keluarga menjadi salah satu hal utama yang dapat memberikan nasehat kepada para pengantar jenazah agar tetap tertib berlalu lintas, dapat menghindari berbagai pelanggaran yang ada sehingga tingkat kecelakaan dapat berkurang.
2. Saran penulis dalam upaya penanggulangan ini adalah dari pihak kepolisian agar dapat mengawal para pengantar jenazah yang ada di jalan-jalan agar mereka bisa tetap tertib berlalu lintas sehingga keselamatan mereka dapat terjaga setiap saat. Dalam hal ini pihak kepolisian harus mengawal tanpa diskriminatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *“Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Prastowo. 2011. *“Memahami Metode- Metode Penelitian”*. Media Jogjakarta. Jogjakarta.
- Bambang Sunggono. 2002. *“Metode Penelitian Hukum”*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *“Hukum Pidana Indonesia”*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Mansur, Arief. 2007. *“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan”*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Maskun. 2011. *“Pengantar Cybercrime”*. Pustaka Pena Press Makassar. Makassar.
- Meleong, Lexy J. 2011. *“Metodologi penelitian kualitatif”*. PT. Remeja Rosdakarya. Bandung.
- Moeljatno. 2008. *“Asas-asas Hukum Pidana”*. Cetakan Ke delapan. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muh. Khalifah Mustamin. 2009. *“Metodologi Penelitian Pendidikan”*. Alauddin Press. Makassar.
- Rusly Effendi. 1986. *“Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi”*. UI Press, Jakarta.
- Ramdlon, Naning. 1983. *“Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas Jalan”*. Rajawali. Jakarta.
- S.Nasution. 2006. *“Metode Research”*. PT.Bumi Aksara. Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *“Tafsir Al-Misbah”*. Cetakan ke VII. Lentera Hati. Tangerang.
- Sudarto. 1981. *“Penanggulangan Kesehatan”*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

- Syahrani, Riduan. 2004. "*Ringkasan Intisari Ilmu Hukum*". PT. Citra Aditnya Bakti. Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2010. "*Kriminologi dalam Hukum Pidana*". PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. "*Asas-asas Hukum Pidana*". Rafika Aditama. Bandung.
- Van Bemmelen, Mr. J. M. 1987. "*Hukum Pidana I*". Bina Cipta. Bandung.
- W. J. S. Poerwadarminta, 1983. "*Kamus umum Bahasa Indonesia*". PT. Balai Pustaka. Jakarta.
- Warpani Suwardjoko, 2005. "*Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*". PT. ITB. Bandung.
- Zainal Abidin Farid. 2007. "*Hukum Pidana I*". Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.



### **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap **Moh.Fauzi Fadlan** dan akrab disapa **Odji**. Lahir di Puskesmas Ma'ssenga, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman pada tanggal 13 Mei 1993 dan merupakan anak ke tiga dari tiga orang bersaudara dari pasangan suami istri Bapak H. Husnul, S.E., M.M dan Hj. Hamsia, S.Farm., M.Kes. Ia memulai pendidikan formal pertamanya pada tahun 1998 di Taman Kanak-Kanak (TK) Idhata dan menyelesaikannya 1 tahun kemudian yaitu pada tahun 1999. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya ke SDN. No. 001 Polewali dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun yang sama, ia melanjutkan pendidikannya ke SMP. Pesantren IMMIM, Tamalanrea dan tamat pada tahun 2008. Kemudian, ia melanjutkan lagi pendidikannya ke SMA Pesantren IMMIM Disamakan Makassar dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus dari SMA Pesantren IMMIM, ia pun meninggalkan kampung halaman guna menimbah ilmu kejenjang yang lebih tinggi yakni bangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK). No. HP. 085343644777.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengantitik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengantitik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em



ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathahdanya</i>	ai	a dan i
	<i>fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...   ...	<i>fathah</i> dan <i>alifa</i> <i>tau</i> ya	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah</i> dan <i>w</i> <i>au</i>	u	u dan garis di atas

Contoh: : *mata*

: *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. *Ta' marbutah*

*Transliterasi* untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

: *al-hikmah*

ber-tasydid ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan (n ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

: *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

: *al-haqq*

: *al-hajj*

: *nu“ima*

: *‘aduwwun*

ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului dengan huruf *alif* (ا) yang ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arabiyyun)

Contoh:

: *rabbana*

**نَجَّيْنَا : najjaina**

: *al-haqq*

: *al-hajj*

: *nu* “ima

: 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalzalah* (az-zalzalah)

: *al-falsafah*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:                   : *ta'muru>na*  
                              : *al-nau'*  
                              : *syai'un*  
                              : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:               *Fi Zilal al-Qur'an*  
  
                          *Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:  
  
                  الله   *dinullah*                   *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*,

ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

*ʾahum fi rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa ma Muhammadunillarasul*

*Innaawwalabaitinwudi ‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan*

*Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur’a>n*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

### ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

CC = Celcius

Jo = Juncto

KM = kilo meter

KUHP = Kita Undang-Undang Hukum Pidana

LLAJ = Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No = Nomor

POLRI = Polisi republik indonesia

R.I = Republik Indonesia

Rp = Rupiah


RUU = Rancangan Undang-undang

SIM = Surat isin mengemudi



SNI	= Standar nasional indonesia
STNK	= surat tanda nomor kendaraan
UU	= Undang-undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
HAM	= Hak Asasi Manusia
swt.	= Subhanau wa ta'ala
saw.	= Sallallahu 'alaihi wa sallam
QS	= Qur'an Surah

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:



=	
=	
=	صلى الله عليه وسلم
=	
=	
=	الى اخرها\
=	

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Pengantar Jenazah (Studi Kasus Polrestabes Makassar)", yang disusun oleh Moh. Fauzy Fadlan, NIM : 10300111038, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Jumat 18 Desember 2015, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Desember 2015 M

6 Rabiul Awal 1437 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag (.....)

Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M. Si (.....)

Munaqisy I : Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag (.....)

Munaqisy II : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag (.....)

Pembimbing I : Drs. H. M. Gazali Syuti, M. III (.....)

Pembimbing II: Dr. Kurniati, S. Ag., M. HI (.....)



Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar, ✓

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag  
NIP. 19621016 199003 1003



**PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI**

Nomor: 1360/HPK/2015


**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS  
YANG DILAKUKAN PENGANTAR JENAZAH (STUDI KASUS  
POLRESTABES KOTA MAKASSAR)**

Gowa, 3 Agustus 2015


Penyusun,

  
**Moh. Fauzi fadlan**  
**Nim. 10300111038**

**Pembimbing I**


  
**Drs. HM. Gazali Suvuti, M. Hi**  
**Nip. 19560603 198703 1 003**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Kurniati, M. Ag**  
**Nip. 19740627 2000604 2002**

**Diketahui Oleh:**

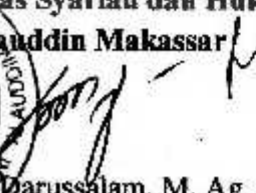
**Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan**

  
**Dra. Nila Sastrawati, M. Si**  
**Nip. 19710712 199703 2 002**

**Disahkan Oleh:**

**Dehan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Alauddin Makassar**



  
**Prof. Dr. Darussalam, M. Ag**  
**Nip. 19621016 1990031 003**

lukas 1/6-15

Tai : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth.

Buat Draft

Ketua Jurusan/Program Studi  
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

no 1 atau 3

Di

Samata-Gowa

3/6-2015

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH FAUZY FADLAN  
NIM : 10300111038  
Semester/Klpk : VIII/HPK 2  
Angkatan : 2011

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

- ✓ 1. Tinjauan yuridis terhadap tindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengantar jenazah.
- ✗ 2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.
- ✓ 3. Pelanggaran terhadap ibu hamil yang mengakibatkan janin meninggal menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Mengetahui  
Penascha Akademik

SAMATA, 1 Juni 2015

Permohon,

( Dr. Hj. Rahmatullah Ht. M.Pd )

( Moh. Fauzy Fadian )



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 56/Tahun 2015

TENTANG

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI  
TAHUN 2015**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Moh. Fauzi Fadlan  
N I M : 10300111038  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Desember 2015  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Pengantar Jenazah (Studi Kasus Polrestabed Makassar)"

**Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Rektor Nomor 192 Tahun 2009 tentang Pedoman Edukasi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si  
Penguji I : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag  
Penguji II : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag  
Pelaksana : 1. Dra. Andi Masniah  
2. Ridawani

**Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2015;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



: Samata  
: 15 Desember 2015